

PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SIDOHARJO

Dewi Kusuma Wardani

Prodi Akuntansi FE Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,
Yogyakarta, email: dewifeust@gmail.com

Ratih Ranika Putri Utami

Prodi Akuntansi FE Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,
Yogyakarta, email: Putriranika6@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of transparency in financial management of village funds and community empowerment on community welfare in Sidoharjo Village, Tepus District, Gunungkidul Regency. This research method uses quantitative descriptive methods and primary data using questionnaires. This study took a sample of residents who were divided into 11 hamlets in Sidoharjo Village, Tepus District, Gunung kidul Regency. The sampling technique is stratified random sampling. Data collection is done by distributing questionnaires directly to people's homes, attending social gatherings and routine meetings held by community members. It aims to obtain more data from respondents directly. The number of questionnaires processed was 120 questionnaires. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that community empowerment has a positive effect on the welfare of the people of Sidoharjo Village, Tepus District, Gunungkidul Regency, while transparency in financial management of village funds does not affect the welfare of the community in Sidoharjo Village, Tepus District, Gunungkidul Regency.

Keywords: *Transparency, financial management, community empowerment, community welfare*

PENDAHULUAN

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya, dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Pemerintah daerah harus mampu menganalisis kebutuhan primer, sekunder

bahkan tersier dengan mengedepankan kebermanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat (Zastrow, 2017).

Soetomo (2017) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah sebuah kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, kradilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas, bukan hanya terciptanya ketertiban dan

keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kesejahteraan mencakup semua tindakan dan proses secara langsung, diantaranya tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup (Sukoco, 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa otonomi

dari adanya penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi (Sukoco, 2015)

Penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi pernah terjadi di Gunungkidul yang menyeret Kepala Desa (KADES) dan perangkat desa sehingga terjerat kasus pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Fenomena Kasus yang Pernah Terjadi di Gunungkidul

No	Tahun	Kasus
1	2013	Terdapat oknum Kepala Desa Wunung, Wonosari yang tertangkap tangan telah melakukan tindakan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2008 sebesar Rp 198 juta
2	2017	Pada akhir tahun 2017 di Desa Beji terjadi tindakan korupsi atau penggelapan Dana Desa yang dilakukan oleh seorang oknum bendahara desa sebesar Rp400 juta, yang seharusnya di alokasikan guna menunjang kesejahteraan masyarakat desa Beji.

Diakses Kamis, 29 November 2018

langsung diberikan kepada desa-desa dalam melakukan urusan rumah tangganya sendiri melalui kucuran dana desa yang di transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah/kabupaten untuk dilanjutkan ke rekening desa dengan jumlah yang berlipat ganda dan jauh lebih banyak dari anggaran dana untuk desa tahun-tahun sebelumnya. Tujuan dari dana desa adalah untuk membangun infrastruktur desa maupun pemberdayaan masyarakat desa, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kebijakan dari Undang- Undang Desa ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilakukan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar

Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, merupakan salah satu desa yang ada di kabupaten Gunungkidul. Desa Sidoharjo adalah salah satu desa dari 5 (lima) desa di kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul, yaitu desa Tepus, Purwodadi, Giripanggung dan Sumberwungu. Kecamatan tepus memiliki jumlah penduduk sebanyak 34.110 jiwa pada sensus tahun 2018 yang terdiri dari 16.248 penduduk laki laki dan 17.862 penduduk perempuan. Penduduk terbanyak ada di desa Tepus dengan jumlah 8.542 penduduk, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah pada desa Sumberwungu sebesar 5.947 penduduk. Luas Kecamatan Tepus yaitu 10.492,21 Ha. Desa terluas adalah desa Tepus dengan luas sebesar 2.855,48 Ha dan desa dengan luas terkecil adalah di Desa Sidoharjo seluas 1.604,29 Ha. Dari segi klasifikasi desa, semua desa di kecamatan Tepus tergolong desa

swakarya yaitu desa yang setingkat lebih maju dari desa swadaya, dimana adat istiadat masyarakat desa sedang mengalami transisi, pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke desa, yang mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertambahnya lapangan pekerjaan di desa, sehingga mata pencaharian penduduk sudah mulai berkembang dari sektor primer ke sektor sekunder, produktifitas mulai meningkat dan diimbangi dengan bertambahnya prasaranan desa. (Sensus Kantor Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul 2017).

Menurut data dari Sensus Penduduk Kantor Kecamatan Tepus pada Tahun 2017, desa Sidoharjo merupakan desa dengan tingkat kesejahteraan masyarakat paling tinggi di badingkan dengan desa-desa yang lain di kecamatan Tepus. Hal ini tentu saja dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu transparansi pengelolaan keuangan dana desa. Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut.

Adanya transparansi pengelolaan keuangan dana desa akan membuat tingkat penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi menjadi lebih minim, karena masyarakat bisa memantau/ mengawasi setiap hal yang dilakukan oleh aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa sehingga kecenderungan aparatur desa untuk berbuat curang menjadi lebih kecil. Apabila pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, tentu dana desa tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi tinggi.

Selain faktor transparansi, pemberdayaan masyarakat juga mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti peningkatan prakrasa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikan hasil produksinya (Aris, 2018). Adanya pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang akan menjadikan masyarakat memiliki sifat kreatif, aktif dan pintar dalam menciptakan peluang pekerjaan ataupun perbaikan perekonomian sehingga akan membuat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas, masih terdapat perdebatan dari hasil masing-masing penelitian sebelumnya, sehingga kesejahteraan masyarakat masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti kembali. Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat desa Sidoharjo, maka pada penelitian kali ini penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh transparansi pengelolaan keuangan dana desa, dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat desa Sidorjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

KAJIAN PUSTAKA

a. Teori *Stewardship*

Stewardship Theory menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi/badan (Wahida, 2015). Teori ini mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi/badan. Teori ini dapat diterapkan

dalam penelitian akuntansi organisasi/badan sektor publik seperti organisasi pemerintahan desa (Wahida, 2015). Sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara organisasi pemerintahan dengan masyarakat. Kontrak hubungan antara organisasi pemerintahan dan masyarakat atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*) dan keterbukaan (transparansi) bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.

Wahida (2015) mengemukakan bahwa teori *stewardship* dapat diaplikasikan untuk menjelaskan eksistensi pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* (manajemen/aparatur pemerintahan) mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi pengelolaan keuangan dana desa yang berkualitas dan transparan.

b. Teori Nurkse

Grand theory kedua yang mendasari penelitian ini adalah teori *Nurkse*. Kesejahteraan masyarakat yang rendah salah satunya disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang tinggi. Bertumpu pada teori *nurkse*, tingkat kesejahteraan yang rendah disebabkan oleh adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan sumber daya manusia

menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan mengakibatkan pendapatan ikut rendah. Rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan yang di terima rendah, pendapatan yang rendah mengakibatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun karena modal untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak maksimal, sehingga diperlukannya program pemberdayaan masyarakat agar tidak ada lagi keterbelakangan pada SDM sehingga masyarakat akan lebih produktif (Kuncoro, 2015).

Kuncoro (2015) mengemukakan bahwa dengan adanya teori *nurkse*, maka pemerintah desa dapat meningkatkan program pemberdayaan masyarakat, dengan program tersebut maka SDM yang ada akan lebih produktif dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara maksimal, sehingga lingkaran kemiskinan akan menurun dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

c. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi sosial yang secara pokok dan langsung untuk meningkatkan keadaan yang baik antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan mencakup semua tindakan dan proses secara langsung yang mencakup tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup (Sukoco, 2015). Kesejahteraan masyarakat adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat, (Zastrow, 2017). Menurut Soetomo (2014) kesejahteraan masyarakat desa merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen dimana masyarakat merasa aman tentram,

terdapat fasilitas umum yang dapat menunjang perekonomian masyarakat, pendapatan perkapita yang mendorong kemakmuran masyarakat dan akses informasi yang mudah dijangkau. Adapun menurut Soetomo (2014) indikator dalam kesejahteraan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

1. Rasa aman
2. Fasilitas umum
3. Pendapatan
4. Akses informasi

Masyarakat yang merasa aman dan tentram tanpa adanya tekanan dari pihak manapun merupakan indikator seseorang yang sejahtera, keberadaan fasilitas umum sebagai penunjang roda perekonomian juga sangat membantu dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, contohnya fasilitas jalan yang layak dan memadai. Selain itu, pendapatan perkapita juga sangat menentukan seberapa sejahteranya seseorang, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin sejahtera hidupnya. Kemudahan memperoleh informasi yang didapatkan masyarakat juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

d. Konsep Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa (Laolo, 2015). Menurut Mardiasmo (2016) transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo (2016) menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa (2008) transparansi dapat diartikan sebagai sesuatu yang jelas dan nyata, dengan demikian transparansi pengelolaan keuangan dana desa berarti prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan. Dengan adanya transparansi, dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai yang akan berdampak langsung kepada masyarakat. Adapun indikator transparansi pengelolaan keuangan dana desa menurut Khanisa (2015) adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah desa
2. Proses pembuatan kebijakan
3. Pelaksanaan kebijakan
4. Hasil yang dicapai

Dalam hal ini, apabila masyarakat dengan mudah dapat mengakses indikator-indikator tersebut, maka sudah dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan sudah transparan terhadap pengelolaan keuangan dana desa (Khanisa, 2015).

e. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Nugroho (2013) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pemberdayaan masyarakat menurut Nugroho (2013) terdapat 4 yaitu sebagai berikut:

1. Akses
2. Partisipasi
3. Kontrol
4. Manfaat

Dalam hal ini akses yang dimaksud adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses program-program pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat dapat pro aktif dan tidak tertinggal. Partisipasi yang dimaksudkan disini adalah

semua warga masyarakat, baik itu masyarakat biasa maupun aparatur desa, sama sama memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, kontrol yang dilakukan secara terus menerus oleh pihak yang berwenang juga dapat membantu keefektifan pemberdayaan masyarakat, agar sesuai sasaran, sehingga akan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat maupun pihak aparatur desa sendiri (Nugroho, 2013).

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat (Nugroho, 2013).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

a. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hadi (2016) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat sangat erat hubungannya dengan transparansi pengelolaan keuangan dana desa. Dimana transparansi merupakan suatu tolak ukur prinsip keterbukaan yang tentu dapat menjadikan masyarakat, terlebih khusus masyarakat desa untuk memperoleh dan mengetahui penjabaran akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan

daerah/desa. Hal tersebut didukung dengan penelitian Mahmudi (2015) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, karena salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah adanya kemudahan akses informasi oleh pemerintah desa. Karena menurut Agus (2015) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai sehingga dapat memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

Menurut Mardiasmo (2015) salah satu komponen *good governance* adalah sikap keterbukaan (transparan) dimana prinsip transparansi ini dapat menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi, selain itu masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan pengelolaan keuangan dana desa tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya.

Dalam penelitian ini teori *stewardship* menjelaskan eksistensi pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan

tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* (manajemen/aparatur pemerintahan) mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi pengelolaan keuangan dana desa yang berkualitas dan transparan (Rusydi, 2017). Jadi semakin terbukannya pemerintah terhadap masukan dan usulan dari masyarakat, maka hal tersebut akan berpengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat. Karena transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dugaan:

H_1 : *Transparansi pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.*

b. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat

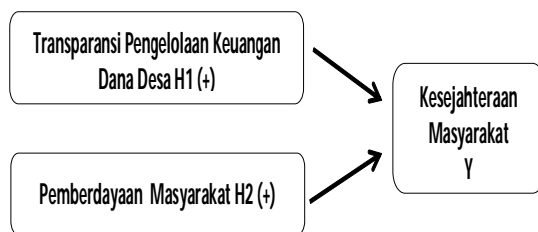
Kesejahteraan masyarakat erat hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat. Menurut Nugroho (2013) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan teori *Nurkse*, dimana kesejahteraan masyarakat itu di pengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat memiliki daya atau berdaya maka masyarakat akan lebih produktif untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, karena pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikan hasil produksinya (Aris, 2018)

Pemberdayaan masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan perbaikan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) maka masyarakat akan memiliki sifat kreatif, aktif dan pintar dalam menciptakan peluang pekerjaan ataupun perbaikan perekonomian, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dugaan:

H_2 : *Pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.*

Rerangka teoritis disajikan pada gambar 1 berikut.



Gambar 1 : Rerangka Teoritis

METODA PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Sempel penelitian ini adalah 120 warga masyarakat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, yang terbagi dari 11 dusun.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh penelitian dan subjek beberapa individu, organisasional, industry atau prespektif lain.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuisioner. Sempel data di peroleh dengan teknik *stratified random sampling*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan angket langsung ke rumah warga secara acak, mendatangi acara arisan maupun pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh warga masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih banyak dari responden secara langsung. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara singkat kepada pihak pemerintah desa dan masyarakat setempat, dengan tujuan mendapat informasi langsung dan akurat. Karakteristik responden disajikan pada tabel 2.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Tabel 2
Karakteristik Responden

Data Diskriptif	Keterangan	Jumlah	Presentase
Alamat tempat tinggal	Dusun Prigi	10	8,33%
	Dusun Bintaos	10	8,33%
	Dusun Klepu	10	8,33%
	Dusun Jati	10	8,33%
	Dusun Benge 1	15	12,5%
	Dusun Benge 2	15	12,5%
	Dusun Pule	10	8,33%
	Ngelo		
	Dusun Pule Ireng	10	8,33%
	Dusun Pule	10	8,33%
	Gundes 1		
	Dusun Pule	10	8,33%
	Gundes 2		
	Dusun Pule Kulon	10	8,33%

Sumber: data primer diolah 2019

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan tabel 3 tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *pearson correlation* yang berada di atas r-tabel dan

Tabel 3
Uji Validitas

No.	Variabel/Indikator	Pearson Correlation	r-tabel	Sig.	Keterangan:
1.	Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa				
	Butir 1.1	0,683	0.1793	0,000	Valid
	Butir 1.2	0,747	0.1793	0,000	Valid
	Butir 1.3	0,780	0.1793	0,000	Valid
	Butir 1.4	0,660	0.1793	0,000	Valid
	Butir 1.5	0,663	0.1793	0,000	Valid
2.	Pemberdayaan Masyarakat				
	Butir 2.1	0,585	0.1793	0,000	Valid
	Butir 2.2	0,786	0.1793	0,000	Valid
	Butir 2.3	0,742	0.1793	0,000	Valid
	Butir 2.4	0,672	0.1793	0,000	Valid
	Butir 2.5	0,680	0.1793	0,000	Valid
3	Kesejahteraan Masyarakat				
	Butir 4.1	0,629	0.1793	0,000	Valid
	Butir 4.2	0,780	0.1793	0,000	Valid
	Butir 4.3	0,770	0.1793	0,000	Valid
	Butir 4.4	0,667	0.1793	0,006	Valid

Sumber: Data diolah tahun 2019

nilai signifikansinya di bawah nilai *alpha*, yaitu 0,05.

Sedangkan hasil Uji Reliabilitas disajikan pada tabel 4.

Berdasarkan tabel 5, maka data dinyatakan berdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,817 dan nilai signifikansinya sebesar 0,516 yang berarti

Tabel 4
Uji Reliabilitas

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa	0,750	Reliabel
2.	Pemberdayaan Masyarakat	0,733	Reliabel
3.	Kesejahteraan Masyarakat	0,677	Reliabel

Sumber: Data diolah tahun 2019

Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS 16.0 berdasarkan hasil *output* SPSS yang tersaji dalam tabel 4 tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih tinggi dari 0,600.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas disajikan pada tabel 5.

lebih besar dari nilai *alpha*, yaitu 0,05 yang berarti residual terdistribusi secara normal sehingga memperkuat normalitas pada model regresi penelitian ini.

2. Uji Multikolonieritas

Hasil Uji Multikolonieritas disajikan pada tabel 6.

Berdasarkan tabel 6 tersebut, dapat dilihat bahwa pengujian data dengan menggunakan program SPSS 16.0 menunjukkan penelitian ini terbebas dari

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters (a,b)	Mean	0.000000
	Std. Deviation	2.49738105
<i>Most Extreme Differences</i>	Absolute	0.075
	Positive	0.051
	Negative	-0.075
<i>Kolomogorov-Smirnov Z</i>		0.817
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,516 ^c

a. Test distribution is Normal.

Tabel 6
Uji Multikolonieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa	0,828	1.207
2	Pemberdayaan Masyarakat	0,683	1.465

Sumber: Data diolah tahun 2019

masalah multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10. Variabel transparansi pengelolaan keuangan dana desa memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,828 dan nilai VIF sebesar 1.207. Variabel pemberdayaan masyarakat memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,683 dan nilai VIF sebesar 1.465.

3. Uji Heterokedasitas

Hasil Uji Heterokedasitas disajikan pada tabel 7.

dari transparansi pengelolaan keuangan dana desa sebesar 0,053. Nilai signifikansi pemberdayaan masyarakat sebesar 0,897.

ANALISIS REGRESI BERGANDA

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang fungsinya untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh antara variabel independen terhadap dependen, dimana variabel independen dalam penelitian ini adalah dua variabel.

Tabel 7
Uji Heterokedasitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	-1,311	1,145	-1.145		0,255
2	Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa	0,097	0,049	0.192	1.957	0,053
3	Pemberdayaan Masyarakat	0,007	0,055	0.014	0,130	0,897

Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil olah data di atas dengan bantuan SPSS versi 16.0, maka penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini didukung dengan nilai signifikansi dari masing-masing variabel yang berada di atas 0,05. Berdasarkan tabel 7, nilai signifikansi

1. Hasil Uji Spesifikasi Model (Uji F)

Uji Spesifikasi Model (Uji F) disajikan pada tabel 8.

Tabel di atas menunjukkan hasil uji model *fit* (Uji F) menyatakan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan

Tabel 8
Uji Spesifikasi Model (Uji F)

No	Model	Sum Of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21.783	3	7.261	3.043	0,032
2	Residual	276.835	116	2.387		
	Total	298.618	119			

Sumber: Data diolah tahun 2019

sebesar 0,032 dan nilai F hitung hasil *output* dari program SPSS sebesar 3.043. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka model dinyatakan berpengaruh signifikan. F hitung 3.043 lebih besar dari pada F tabel 2,68 sehingga dengan kata lain, model dalam penelitian ini dinyatakan *fit*.

2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Hasil Uji Parsial (Uji t) disajikan pada tabel 9.

Tabel 9 menjelaskan sebagai berikut:

1. Variabel transparansi pengelolaan keuangan dana desa memiliki nilai t hitung sebesar -0,478 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,980 dan hasil uji t untuk variabel transparansi pengelolaan keuangan dana desa diperoleh nilai signifikan yaitu sebesar 0,634 dan nilai koefisiennya sebesar -0,039. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 9
Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	13.974	1,874		7,456	0,000
2	Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa	-0,039	0,081	-0,047	-0,478	0,634
3	Pemberdayaan Masyarakat	0,241	0,090	0,291	2,669	0,009

Sumber: Data diolah tahun 2019

Pembuktian lain mengenai variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen adalah dengan membandingkan nilai t-hitung dan t-tabel serta tingkat signifikansinya berada dibawah 0,05. Apabila t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya, jika t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.

2. Variabel pemberdayaan masyarakat memiliki t hitung sebesar 2,669 lebih besar dari t tabel sebesar 1,980 dan nilai signifikansinya 0,009 dan nilai koefisien 0,241. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) disajikan pada tabel 10.

Tabel 10
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,244(a)	0,059	0,035	2.529

Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *R Square* adalah 0,059 atau 5,9%. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dana desa, pemberdayaan masyarakat, kebijakan pemerintah desa dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebesar 5,9%, sedangkan sisanya 94,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil olah data dengan bantuan program SPSS versi 16.0 maka dapat disimpulkan mengenai hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah transparansi pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil *t* hitung sebesar -0,478 lebih kecil dari *t* tabel sebesar 1,980, nilai signifikansinya 0,634 dan nilai koefisien -0,039. Berdasarkan hasil tersebut, maka H_1 tidak terdukung.

Transparansi pengelolaan keuangan dana desa yang tidak berpengaruh terhadap

kesejahteraan masyarakat dapat disebabkan oleh adanya rasionalitas formal. Rasionalitas formal dalam hal ini meliputi proses berfikir dan menetapkan keputusan yang memiliki timbal balik positif terhadap pihak yang memiliki wewenang atau kekuasaan tersebut. Selain itu, rasionalitas formal menekankan pada hubungan pemerintah desa dengan masyarakat yang bersifat atau didasarkan pada tekanan/koersif, yaitu hubungan yang terbangun dari rekayasa sosial dari pihak yang memiliki otoritas (kekuasaan) terhadap yang *powerless*. Rasionalitas formal ini biasanya diarahkan secara rasional untuk mencapai suatu tujuan formalitas tertentu, salah satunya adalah sifat pokok yang harus diterapkan dalam suatu organisasi/pemerintahan, yaitu sifat transparan. Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, tidak seharusnya hanya mengutamakan rasionalitas formal saja, namun harus mengedepankan nilai dan kewajiban dalam mengupayakan sifat transparan agar memiliki dampak positif bagi masyarakat. Pendapat tersebut sudah sesuai dan diperkuat dengan hasil analisis jawaban responden atas pernyataan seluruh kegiatan dan laporan pengelolaan dana desa mudah diketahui oleh masyarakat.

Mayoritas responden menjawab setuju, artinya masyarakat sudah mengakui bahwa transparansi kegiatan dan laporan pengelolaan dana desa itu sudah berjalan transparan namun demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Transparan dalam hal ini hanya sebagai rasionalitas formal yang diterapkan oleh pemerintah, namun tidak dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mengakui bahwa

pemerintah desa telah transparan, namun tidak memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Hal ini sesuai dengan teori aksi dan pilihan rasional *max waber* yang menjelaskan bahwa sebuah organisasi/pemerintahan memiliki sifat alami yaitu rasionalitas formal, dimana pihak yang memiliki kekuasaan akan menerapkan suatu tindakan yang menguntungkan golongan tersebut atau atas dasar tujuan tertentu. Dalam teori aksi ini disebutkan bahwa organisasi/pemerintah akan menerapkan suatu tindakan atas dasar mengikuti peraturan yang berlaku atau kebiasaan yang telah berlaku, tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut memiliki dampak positif atau tidak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, rasionalitas formal dalam teori aksi dapat di simpulkan sebagai suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diterapkan dan membawa timbal balik positif kepada seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau wewenang (Ritzer, 2005).

2. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis 2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil *t* hitung sebesar 2,669 lebih besar dari nilai *t* tabel sebesar 1,980 dengan nilai signifikansi 0,009 dan nilai koefisiennya sebesar 0,241. Berdasarkan hasil tersebut, maka H_2 terdukung.

Pemberdayaan masyarakat yang baik yaitu pemberdayaan yang memiliki pengaruh positif terhadap warga masyarakat, dengan adanya pemberdayaan masyarakat maka faktor-faktor pendukung kesejahteraan akan tercapai. Sebagai contoh, masyarakat desa yang biasanya menjual hasil panen dengan harga rendah, melalui pemberdayaan masyarakat maka akan

dibantu untuk mengolah hasil panen agar memiliki harga jual yang lebih tinggi, yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terbebas dari masalah kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori *Nurkse* bahwa kesejahteraan masyarakat yang rendah salah satunya disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang tinggi. Dari acuan teori *nurkse*, tingkat kesejahteraan yang rendah disebabkan oleh adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan berdampak pada pendapatan yang rendah. Oleh sebab itu, pendapatan yang rendah mengakibatkan kesejahteraan masyarakat juga menurun karena modal untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak maksimal, sehingga diperlukannya program pemberdayaan masyarakat agar tidak ada lagi keterbelakangan pada SDM sehingga masyarakat akan lebih produktif (Kuncoro, 2015).

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan menunjukkan bukti pengaruh transparansi pengelolaan keuangan dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian dilakukan terhadap 120 responden yang tinggal di desa Sidoharjo, kecamatan Tepus, kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan transparansi pengelolaan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan diharapkan dapat memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya.

- a. Penelitian ini hanya mencakup tiga variabel untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu transparansi pengelolaan keuangan dana desa, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan pemerintah desa.
- b. Penelitian ini menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu kuesioner dan wawancara singkat. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang terkumpul melalui kuesioner dan wawancara singkat tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa
Pemerintah desa hendaknya memperhatikan dan meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat karena dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain selain yang digunakan dalam penelitian ini, baik dengan cara penggantian variabel atau penambahan variabel. Variabel independen lain yang dapat digunakan adalah akuntabilitas. Sumber data untuk penelitian selanjutnya dapat diperoleh tidak hanya dari kuesioner dan wawancara singkat, namun dapat menggunakan sistem wawancara terstruktur kepada pihak pemerintah desa maupun pihak masyarakat agar informasi yang didapat dari responden lebih lengkap, obyektif, dan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). "Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa". *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)". *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1), 67–81.
- Albertus. (2016). "The Influence of Empowering Rural, Communities On Increasing The Income and Welfare Of The Community". *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, S. D., & Caecilia Srimidarti. (2018). "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Prosiding*, (2017), 978–979.
- Astari, Furqani. (2015). "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)". *Thesis*.
- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). "Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12.
- Azwardi, Sukanto. (2014). "Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatra Selatan". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29–41.
- Chandra. (2014). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa". *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1203–1212.
- Damayanti, W. (2018). "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa". *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5.

- Darmiasih, dkk. (2015). "Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem)". *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(3)
- Dura, J. (2018). "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26–32.
- Ekaputra, Y. D., Sudarwani, M. M., & Dewi Fatmasari. (2014). "Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman Guna Perbaikan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Mantran Wetan Kabupaten Magelang". 120–141.
- Elsa, Dwi. (2016). "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng". *Artikel Ilmiah*, Jember.
- Faridah (2015). "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya". *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(1).
- Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, S. W. A. (2018). "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, d(2), 512–528.
- Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan". *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM dan SPSS 16*. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM Dan SPSS 16.
- ICW. (2018, February 5). *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*. Retrieved from Antikorupsi , Indonesia Corruption Watch: <https://antikorupsi.org/id/news/outlook-dana-desa-2018-potensi-penyalahgunaan-anggaran-desa-di-tahun-politik>.
- Kartasasmita, G. (1997). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mahendra, B. P. (2017). "Analisis Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm Mp) Terhadap Produktifitas Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat". *International Journal of Social Science and Business*, 1(1), 1.
- Mahfudz (2014). "Analisis Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa". Universitas Diponegoro. Semarang.
- Miriam (2012). "Penerapan Otonomi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo". Yogyakarta: UNY.
- Nugroho (2013). "Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pemukiman Guna Perbaikan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Mntan Wetan Kabupaten Magelang". *Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514–526.